

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR: 50 /KPTS/SEK. DPRD/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menimbang

- : a. bahwa Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I huruf E angka 1 huruf 1 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai Tugas menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 untuk membantu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran perlu menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan dan

- Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Prekonomian Nasilnal dan/atau Stabiltas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 8. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7
 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023
 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022
 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

Memperhatikan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.

PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negesi Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini <u>sebagai</u> Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo dan melaksanakan tugas, meliputi :

 mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

- menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Penyelenggaraan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SENGKANG
PADA TAMBUTAL : 2 JANUARI 2023
SEKRETARIS DPRO KABUPATEN WAJO

Drs. SAINAL HAVAT. M.Si Pangkat Pembina Utama Muda I, IV/c Nip. 19670101 199603 1 007

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Wajo, di Sengkang;

- 2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
- 3. Inspektur Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kab, Wajo
- 5. Arsip

TANGGAL NOMOR LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO : 50 / KPTS / SEK.DPRD /2023

: PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023 : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

														1155									-	-	NO.
																					HP 082336804240	NIP. 19820819 200902 1 004	ANDI GUSTI SAM, S.H	2	NAMA/NIP/HP
							3,00															Kesekretarintan	Kepala Bagian Administrasi	3	JABATAN
Penya enguaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyedisan Bahan Material	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangun Bangunan Kantor	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perandang-Undangan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawujan Perangkat Daerah	Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tri vulau Semesteran SKPD	Penge olaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Koordinasi dan Penyusunann Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksanaan Penatausahkan dan Pengujian/Verifikasi Kecangan SKPD	Penyediaan Gaji dun Turijangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Dacrah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN
1 925 533 800	48.584.000	6 997 100	50.000.000	6 990 900	2,038,105,800	126.000.000	100.150.000	226.150.000	13 520.800	3,495,400	17.016.200	25 475 000	2 500 000	3 824 400	15.708.900	3.156.707.899	3,204,216,199	3.500.000	4 770 700	4.781.500	10.500,000	23.552.100	23,591,713,971	5	ANGGARAN (Rp)
APBD	0 APBD	0 APBD	0 APBD	0 APBD	3	0 APBD	Γ	Ī	0 APBD	0 APBD	-	0 APBD	APBD	0 APBD	APBD	APBD) APBD	APBD	APBD					SUMBER DANA
																								6	KET.

																							1	NO.
																							2	NAMA/NIP/HP
																							3	JABATAN
	Koordinasi dan Konsultasi Pelusanaan Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Layanan Adminsitrasi DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Mebel	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenduraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN
וויה בריי וויו רב	8 852 961 800	8,852,961,800	8,852,961,800	326.477.100	326,477,100	53,800,000	450.000.000	15.227.428.772	15.731.228.772	49.950,000	280 609 700	5,040,000	122,000,000	278.932.000	736,531,700	759.408.000	310.050.000	49.986.800	1.119.444.800	159,991,200	9,000,000	168,991,200	5	ANGGARAN (Rp)
	0 APBD	0	9	0 APBD	0	0 APBD	0 APBD	2 APBD	2	0 APBD	0 APBD	0 APBD	0 APBD	APBD		0 APBD	APBD	APBD		APBD	APBD			SUMBER DANA
																							6	KET.

																							HP. 08124242868	NIP 19691231 199003 I 026	2 Dr.H. ALIAS SIDE, SH.MH Kabag Legislasi dan Persidangan	1 2 3	
HATMUE	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pendalaman Tugas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Persidangan KABUPATEN/KOTA		
2.315,791,900	3 492 700	18,000,000	8 000,000	29,492,700	7.000.000	7.000,000	5.000,000	37.500,000	220.000.000	31 120,000	244.200,000	537,820,000	7.000,000	240,000,000	151,272,400	165.000.000	10,000,000	573.272.400	1.147.585,100	120.007.600	120,007,600	43,800,000	1.004.399.200	1,048,199,200	1.168.206.800	5	
	APBD	APBD	APBD		APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD			APBD		APBD	APBD				
																										6	2000

																					çu .	1	NO.
																			HP. 08124225470	NIP 19680427 199302 2 006	Dra. RATNA NINGSIH, M.Si	2	NAMA/NIP/HP
The second secon									- 1:											Pengawasan	Kabag Penganggaran dan	3	JABATAN
TOTAL ANGCARAN	HYTMÜL	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan Reses	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Auspirasi Masyarakat	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawahan Kepala Daerah	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekenomian	Pengawasan Urusen Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusen Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembahasan Pertanggungjawahan APBD	Pembihasan APBD Perubahan	Pembihasan APBD	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembihasan KUA dan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN
36 297 467 671	1,537,000,000	3.500,000	3,500,000	1.344,000,000	7.000.000	1,351,000,000	25.000.000	10,000,000	3,500,000	3,500,000	3.500,000	3.500.000	3,500,000	52,500,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000	130,000,000	1,537,000,000	S	ANGGARAN (Rp)
The second secon		APBD		APBD	APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD				SUMBER DANA
																						6	KET.

